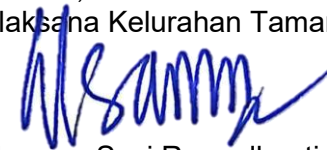


**DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN/ RAHASIA
KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

No	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		JANGKA WAKTU Pengecualian
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data pribadi warga (KTP, KK, akta kelahiran, dokumen kependudukan)	Pasal 17 huruf h UU KIP	melindungi hak warga atas informasi umum	menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak disalahgunakan	Selama data masih berlaku
2	Dokumen internal terkait investigasi pelanggaran disiplin aparatur kelurahan	Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP	transparansi umum tetap terjaga	agar tidak menghambat proses pemeriksaan dan penyelidikan	Hingga proses selesai
3	Rencana pengadaan barang/jasa sebelum diumumkan resmi	Pasal 17 huruf e angka 4 UU KIP	setelah diumumkan resmi	mencegah spekulasi dan praktik tidak sehat	Sampai pengumuman resmi
4	Memorandum internal antar perangkat daerah (surat dinas yang bersifat rahasia)	Pasal 17 huruf i UU KIP	setelah ada keputusan hukum	menjaga kerahasiaan jabatan dan proses administrasi	Sesuai ketentuan hukum
5	Data kondisi kesehatan individu warga yang ditangani kelurahan (misalnya rujukan medis)	Pasal 17 huruf h angka 2 UU KIP	untuk kepentingan agregat (statistik kesehatan)	melindungi privasi warga	Selama data masih berlaku

Jakarta, 11 Februari 2026
PPID Pelaksana Kelurahan Taman Sari,



Elsaning Suci Ramadhanti
NIP 198802042010012020

MATRIKS UJI KONSEKUENSI
Informasi yang Diuji: Data Pribadi Warga (KTP, KK, Akta Kelahiran, Dokumen Kependudukan)

No	A. INDIKATOR MUTLAK	PENILAIAN	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	YA	Dokumen investigasi internal harus ditutup agar tidak mengganggu proses pemeriksaan
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP (mengungkapkan Identitas Informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	YA	Data pelapor/saksi tidak boleh dibuka untuk melindungi keselamatan dan privasi
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 3 UU KIP (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	TIDAK	Tidak relevan di tingkat kelurahan
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 4 UU KIP (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya)	YA	Informasi tertentu dapat membahayakan aparat jika dibuka
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 5 UU KIP (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum)	TIDAK	Tidak ada data terkait di kelurahan
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf b UU KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	YA	Rencana pengadaan sebelum diumumkan resmi bisa menimbulkan spekulasi dan persaingan tidak sehat

No	A. INDIKATOR MUTLAK	PENILAIAN	PERTIMBANGAN
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 1 UU KIP (informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 2 UU KIP (dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik, dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 3 UU KIP (jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
10	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 4 UU KIP (gambar dan data tentang situasi dan keadaan pengakhiran dan/ atau instalasi militer)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
11	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 5 UU KIP (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan

No	A. INDIKATOR MUTLAK	PENILAIAN	PERTIMBANGAN
12	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP (sistem persandian negara)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
13	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 7 UU KIP (sistem persandian negara)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
14	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf d UU KIP (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
15	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 1 UU KIP (rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham, dan aset vital milik negara)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
16	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 2 UU KIP (rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
17	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 3 UU KIP (rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
18	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 4 UU KIP (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
19	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 5 UU KIP (rencana awal investasi asing)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan

No	A. INDIKATOR MUTLAK	PENILAIAN	PERTIMBANGAN
20	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
21	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 7 UU KIP (hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
22	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 1 UU KIP (posisi, daya tawar, dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
23	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 2 UU KIP (korespondensi diplomatik antarnegara)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
24	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 3 UU KIP (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
25	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 4 UU KIP (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri)	TIDAK	Tidak relevan di kelurahan
26	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf g UU KIP (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemuan terakhir ataupun wasiat seseorang)	YA	Dokumen pribadi warga tidak boleh dibuka
27	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 1 UU KIP (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	YA	Data pribadi warga harus ditutup untuk melindungi privasi

No	A. INDIKATOR MUTLAK	PENILAIAN	PERTIMBANGAN
28	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 2 UU KIP (riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	YA	Data pribadi warga harus ditutup untuk melindungi privasi
29	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	YA	Data pribadi warga harus ditutup untuk melindungi privasi
30	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	YA	Data pribadi warga harus ditutup untuk melindungi privasi
31	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal)	YA	Data pribadi warga harus ditutup untuk melindungi privasi
32	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf i UU KIP (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atau putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	YA	Surat internal kelurahan bersifat rahasia jabatan
	Jika ada satu atau lebih jawaban ya, maka tidak perlu untuk uji konsekuensi. Dengan demikian informasi yang dimaksud merupakan Informasi yang Dikecualikan (Tidak dapat dipublikasikan kepada publik)	YA	Tidak relevan di kelurahan
Jika semua jawaban adalah Tidak, maka dilanjutkan dengan mengisi bagian B			

NO	B. INDIKATOR KONSEKUENSI TERTIMBANG	PENILAIAN	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 Ayat (3) huruf d UU KIP (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	YA	Surat internal kelurahan terkait strategi pelayanan publik ditutup sementara
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 Ayat (3) huruf e UU KIP (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	YA	Informasi yang belum terdokumentasi tidak bisa diberikan ke publik
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya menurut Pasal 17 huruf j UU KIP. Jika ya, sebutkan	YA	Misalnya data perlindungan anak sesuai UU Perlindungan Anak

Jakarta, 11 Februari 2026
PPID Pelaksana Kelurahan Duri Utara,

Elsaning Suci Ramadhanti
NIP 198802042010012020